



**ARCHIPELAGO ESSAY COMPETITION 2016**

**UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN  
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA**

**Diusulkan oleh:**

**ADE IRAWAN (05051281320005)**

**AZMI AFRIANSYAH (05121005022)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2016**

# UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA

Ade Irawan dan Azmi Afriansyah  
Universitas Sriwijaya

## ABSTRAK

Provinsi-provinsi yang berada di Indonesia bagian timur memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah yang ditandai dengan mendapatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Provinsi-provinsi yang berada di Indonesia bagian timur memiliki kekayaan alam yang berlimpah salah satunya berasal dari wilayah perairan. Wilayah perairan di Indonesia begitu luas yang memberikan sumberdaya perikanan begitu berlimpah baik yang dihasilkan dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap di Indonesia dinilai masih sulit untuk dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Secara umum, produksi perikanan tangkap dunia sudah mengalami stagnasi dan sudah mencapai titik optimal sehingga tidak mungkin untuk terus ditingkatkan. Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha guna mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), menyerap tenaga kerja (*pro-job*) serta sekaligus mampu sebagai tumpuan pijakan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perikanan tersebut dapat menerapkan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan yang berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia sebagai penanam modal, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidik sumberdaya manusia, lembaga keuangan sebagai pengelola dana, dan pemerintahan setempat sebagai penggerak kebijakan dimasyarakat dengan tetap berpegang teguh pada tiga azas yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro-rakyat, 2) pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas, 3) penguatan daerah dengan prinsip daerah kuat-bangsa dan negara kuat. Tiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral pada proses pembangunannya. Sehingga, dari penerapan konsep ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan khususnya Indonesia bagian Timur yang pada umumnya lambat dalam perkembangannya, dengan menggunakan pendekatan ini tingkat pertumbuhan menjadi cepat layaknya sebuah kota.

***Kata Kunci: Minapolitan, Perikanan Budidaya, Kesejahteraan Masyarakat***

## **UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA**

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan *World Food Programme* (WFP) (2015) mengatakan bahwa secara umum kemiskinan telah berkurang, namun masih tinggi di Indonesia bagian timur. Sebagian besar kabupaten-kabupaten di provinsi Papua, Papua Barat dan NTT memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 25 besar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional (UU No 17 Tahun 2007). Provinsi-provinsi yang berada di Indonesia bagian timur memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah yang ditandai dengan mendapatkan peringkat IPM terendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia (KKP, 2011). Provinsi-provinsi yang berada di Indonesia bagian timur memiliki kekayaan alam yang berlimpah salah satunya berasal dari wilayah perairan. Wilayah perairan di Indonesia begitu luas yang memberikan sumberdaya perikanan begitu berlimpah baik yang dihasilkan dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Perikanan tangkap di Indonesia dinilai masih sulit untuk dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Pada tahun 2010, produksi perikanan tangkap mencapai 5.039.446 ton dan dengan jumlah nelayan 2.162.442 orang, sehingga rata-rata nelayan per tahun hanya memperoleh hasil tangkapan 2,3 ton atau nelayan (pendapatan kotor, belum termasuk biaya operasional). Secara umum, produksi perikanan tangkap dunia sudah mengalami stagnasi dan sudah mencapai titik optimal sehingga tidak mungkin untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi perikanan yang masih belum termanfaatkan dengan baik dan terus akan meningkat sejalan dengan tingkat teknologi yang digunakan adalah sumberdaya perikanan budidaya (Wicaksono *et al.*, 2015).

Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha guna mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja serta sekaligus mampu sebagai tumpuan pijakan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara

berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan pengelolaan potensi perikanan yang terintegrasi melalui minapolitan dengan tujuan 1) meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; 2) meningkatkan pendapatan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah atau pemasar ikan) yang adil dan merata; dan 3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah (KKP, 2010; Haryadi *et al.*, 2014).

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4).

Pengoptimalkan potensi perikanan dapat menerapkan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep minapolitan yang berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia yang berpegang teguh pada tiga azas yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro-rakyat, 2) pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas, 3) penguatan daerah dengan prinsip daerah kuat-bangsa dan negara kuat. Tiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral pada proses pembangunannya. Tujuan dari penerapan konsep ini guna percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan khususnya Indonesia bagian Timur yang pada umumnya lambat dalam perkembangannya, dengan menggunakan pendekatan ini tingkat pertumbuhan menjadi cepat layaknya sebuah kota.

Salah satu parameter yang mendukung dalam pembangunan suatu negara ialah melihat angka IPM. IPM Indonesia tahun 2011 disajikan pada Lampiran 1.

Berdasarkan Lampiran 1 dapat disimpulkan bahwa IPM pada provinsi-provinsi yang berada pada Indonesia bagian Timur memiliki peringkat sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi DKI Jakarta menjadi pemegang peringkat pertama. Hal tersebut terlihat pembangunan yang cukup timpang jika membandingkan pembangunan di Indonesia bagian timur dan ibu kota negara.

Provinsi-provinsi yang berada pada Indonesia bagian timur memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah seperti sumber daya perikananannya. Sumber daya alam yang berlimpah memberikan peluang kepada perusahaan-perusahaan untuk menanamkan modal. Data-data tentang perusahaan yang menanamkan modalnya pada budidaya perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut provinsi dan status penanaman modal tahun 2014 (BPS, 2015)

Provinsi	PMA	PMDN	Lainnya	Jumlah
Sumatera Utara	6	1	2	9
Sumatera Barat	1	-	-	1
Jambi	1	-	-	1
Bengkulu	-	1	1	2
Lampung	9	2	6	17
Bangka Belitung	1	-	1	2
DKI Jakarta	1	-	-	2
Jawa Barat	7	-	6	13
Jawa Tengah	2	3	-	5
D.I. Yogyakarta	1	-	-	1
Jawa Timur	59	1	44	104
Banten	3	1	4	8
Bali	4	4	6	14
Nusa Tenggara Barat	15	5	9	29
Nusa Tenggara Timur	2	4	-	6
Kalimantan Barat	6	1	2	9
Kalimantan Tengah	2	-	-	2
Kalimantan Timur	2	-	2	4
Sulawesi Tengah	1	-	1	2
Sulawesi Selatan	6	1	10	17
Sulawesi Tenggara	-	2	2	4
Maluku	3	-	2	5
Maluku Utara	-	-	2	2
Papua	-	2	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>131</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>261</b>

Pada tahun 2014, jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan perikanan mencapai 261 perusahaan, tersebar di 24 provinsi dan terbanyak berlokasi di

Provinsi Jawa Timur 39,85 persen. Jenis kegiatan budidaya perikanan masih didominasi oleh kegiatan budidaya tambak (136 perusahaan), kegiatan pembenihan (69 perusahaan), kemudian budidaya laut (40 perusahaan) dan budidaya air tawar (16 perusahaan) (BPS, 2015).

Sumberdaya sektor perikanan berpotensi dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional, akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Sejalan dengan perubahan yang begitu cepat disegala bidang maka kebijakan pembangunan perikanan memerlukan perubahan atau penyesuaian. Kebijakan terobosan yang dicanangkan oleh KKP adalah melalui Revolusi Biru (perubahan cara berpikir dari daratan ke maritim) yang dimplementasikan melalui konsep minapolitan. Minapolitan yaitu konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sector kelautan dan perikanan, dengan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Ada tiga basis dalam program minapolitan yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan sentra garam. Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap dan budidaya (Aswanah *et al.*, 2013).

Pengoptimalan potensi pesisir dapat menerapkan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan. Minapolitan merupakan sebuah konsep pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan Minapolitan secara bebas diartikan sebagai kota perikanan. Minapolitan ditujukan guna percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan khususnya bagi daerah pedesaan yang pada umumnya lambat dalam perkembangannya, dengan menggunakan pendekatan cepat tumbuh layaknya sebuah kota (Khamarullah, 2014).

Konsep Minapolitan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan, pelaksanaan Minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2) pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas,

3) penguatan daerah dengan prinsip daerah kuat-bangsa dan negara kuat. Tiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral pada proses pembangunannya (Khamarullah, 2014).

Implementasi program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan budidaya harus menerapkan prinsip-prinsip dasar yang meliputi; (1) Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kemudian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan, (2) Ketepatan pelaksana, ketepatan pelaksana berkaitan dengan berapa dan siapa saja pihak-pihak yang dipilih untuk melaksanakan sebuah kebijakan/program serta keterlibatan pihak swasta dan masyarakat, (3) Ketepatan target, ketepatan target berkaitan dengan dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar lokasi yang menjadi target kebijakan serta masyarakat di lokasi tersebut, (4) Ketepatan lingkungan kebijakan, ada dua lingkungan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan maupun program, pertama, lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri dari *public opinion* yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta *individuals* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, (5) Ketepatan proses, ketepatan proses disini secara garis besar melihat bagaimana para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan dilihat dari apakah mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan bagi masyarakat target kebijakan dan siap menjadi pelaksana kebijakan bagi pemerintah (Wicaksono *et al.*, 2015 ).

Pengembangan kawasan minapolitan berbasis budidaya perikanan dapat mengkombinasikan strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi (a) Pemberdayaan sumber daya manusia, dalam rangka mengembangkan UMKM Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah strategi Pemberdayaan Sumber daya manusia melalui pemberian pembinaan dan pelatihan; (b) Pemberian bantuan modal usaha, sebagai usaha perseorangan, UMKM budidaya perikanan memiliki sumber permodalan yang terbatas. Penguatan sumber permodalan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bantuan permodalan berupa peralatan atau pun sarana penunjang produksi seperti bantuan bibit atau benih dan pakan, serta adanya program-program unggulan (c) Pengembangan Balai Benih Ikan BBI, BBI memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pengembangan usaha budidaya perikanan dalam hal penyediaan bibit atau benih unggul sebagai bahan baku utama usaha budidaya perikanan (Khamarullah, 2014).

Kesimpulan dari Tabel 1 menunjukkan bahwa perusahaan perikanan budidaya banyak menanamkan modalnya di provinsi Jawa Timur. Perusahaan-perusahaan perikanan budidaya yang ada di Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintahan setempat dan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia bagian timur melalui kegiatan Minapolitan berbasis perikanan budidaya. Kebijakan-kebijakan yang disepakati antara pemerintah dan perusahaan penanam modal ialah berdasarkan azas kepentingan rakyat (perikanan pro-rakyat).

Kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan minapolitan berbasis perikanan budidaya harus menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan visi Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, yaitu perairan Indonesia bebas *illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada



masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bentuk pengabdian Perguruan Tinggi kepada masyarakat dalam kegiatan minapolitan berbasis perikanan budidaya ialah dengan terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola secara berkelanjutan melalui kontinuitas perbaikan kemampuan sumberdaya manusia, penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi yang seluruhnya diarahkan bagi terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris yang disesuaikan dengan kompetensi dan unggulan pada setiap daerah (Kementerian PPN/Bappenas, 2005 ).

Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional, dan petambak garam melalui: (a) penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan; (b) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan; (c) pengembangan fasilitasi kredit usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan asuransi nelayan; dan (d) fasilitasi sertifikasi tanah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan (Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Sektor keuangan juga memberikan peran penting dalam mewujudkan kawasan minapolitas berbasis budidaya. Pengembangan sektor keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi dan peningkatan ketahanan terhadap gejolak yang melanda sektor keuangan dan perekonomian melalui penguatan kondisi internal industri jasa keuangan, penguatan sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, penguatan sistem

pengawasan perbankan yang independen dan efektif, penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung, serta perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Khusus untuk mendorong peningkatan kemampuan UKM, pembiayaan dikembangkan dengan tetap berdasarkan pada pertimbangan mekanisme pasar, namun menyediakan bantuan teknis guna memperkuat kelembagaan, baik di sisi bank maupun di sisi penerima pinjaman (Kementerian PPN/Bappenas, 2005).

Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan diupayakan di dalam berbagai tingkat guna menjaga berlangsungnya mekanisme pasar melalui pengembangan institusi pasar sesuai dinamika kebutuhan, pengembangan kerangka regulasi yang non-diskriminatif, serta perbaikan fasilitasi subsidi dan insentif yang tepat sasaran baik dari segi jangka waktu maupun kelompok penerima dengan mekanisme yang transparan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjamin terciptanya iklim usaha yang berdasarkan persaingan secara sehat pada setiap segmen perekonomian (Kementerian PPN/Bappenas, 2005).

Menurut Menko-Perekonomian, Darmin Nasution yang dikutip dari berita Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) edisi 9 November 2015, saat ini terdapat 8 (delapan) KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah, yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

Wilayah Indonesia bagian timur yang termasuk kedalam Kawasan Ekonomi Khusus yang dicanangkan pemerintah ialah Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara). Dari beberapa wilayah tersebut yang berkaitan dengan bidang perikanan sebagai fokus misi pemerintah dalam koridor ekonomi MP3EI ialah Koridor Ekonomi Sulawesi, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku (Saliem, *et al.*, 2011).

Indonesia memiliki kedudukan penting dalam kegiatan ekonomi utama perikanan. Dengan kekayaan laut yang berlimpah, saat ini pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun, sehingga menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di Asia Tenggara. Sektor perikanan merupakan salah

satu kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Sulawesi. Saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub-sektor pertanian pangan (70 persen tangkapan dan 30 persen budidaya) yang mana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya yang memiliki manfaat untuk mengurangi eksploitasi penangkapan ikan yang berlebihan dan meningkatkan produksi perikanan berkelanjutan. Pengembangan perikanan budidaya di area tambak di koridor ini ideal untuk budidaya udang yang memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dari pada nilai jual rumput laut yang mendominasi hasil produksi akuakultur (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011).

Pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dengan mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perikanan di Indonesia sebagai penanam modal, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidik sumberdaya manusia, lembaga keuangan sebagai pengelola dana, dan pemerintahan setempat sebagai penggerak kebijakan dimasyarakat, menerapkan kebijakan-kebijakan Minapolitan perikanan budidaya berdasarkan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memberikan kontrol terhadap kegiatan Minapolitan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswanah, YK., A. Efani, dan A. Tjahjono. 2013. Evaluasi terhadap implementasi terhadap pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap dipelabuhan perikanan nusantara (ppn) brondong kabupaten lamongan jawa timur. *Jurnal ECSOFiM*. 1(1):97-108.
- BPS. 2015. *Statistik Perusahaan Perikanan 2014*. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). 2015. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2015-2019*. Jakarta: PSDKP.
- Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan World Food Programme (WFP). 2015. *Peta Ketahan dan Kerentanan Pangan Indonesia*. Jakarta: DKP Kementerian Pertanian dan WFP.

- Haryadi, I., S. Amanah, dan S. Suriatna. 2014. Persepsi pembudidaya ikan terhadap kompetisi penyuluh perikanan di kawasan minapolitan (kasus di kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat). *Jurnal Penyuluhan*. 10(2):123-130.
- Khamarullah, A., A.J.A. Gani, dan Riyanto. 2014. Strategi dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis minapolitan (studi pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(4):591-596.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan percepatan dan Perluasan Pemangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian PPN/Bappenas. 2005. *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- KKP. 2011. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
- Nasution, D. 2015. Menggerakkan ekonomi di wilayah pinggiran melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (kek). <http://kek.ekon.go.id/menggerakkan-ekonomi-di-wilayah-pinggiran-melalui-pengembangan-kawasan-ekonomi-khusus-kek/> .Dikses pada 4 Januari 2016.
- Saliem, H.P., Supriyati, E. Jamal, S.H., Susilowati, H.J. Purba, dan R. Cantayani. 2011. Kajian masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (mp3ei). *Laporan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- UU No 17 Tahun 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*. Jakarta: Bappenas.
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
- Wicaksono, T.A.B., Z. Hidayat dan D. Rostyaningsih. 2015 . Implementasi program pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya di Rajapurbawa kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy And Management Review*. 4(3): 1-11.